

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang dan Masalah**

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup atau kesejahteraan manusia, baik orang per-orang maupun bagi seluruh masyarakat. Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya sadar dan terencana untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat untuk jangka panjang. Program pembangunan di masa otonomi daerah seperti sekarang ini sudah seharusnya berubah sejalan dengan perubahan kewenangan kelembagaan yang mengurus pembangunan itu sendiri (Mardikanto, 1993).

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak lepas dari prinsip-prinsip otonomi, yang diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta dengan memperhatikan potensi daerah pada saat pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan hendaknya diusahakan untuk lebih banyak menaruh perhatian pada aspek masyarakat yang juga berarti

aspek manusianya. Salah satu indikasi bahwa sudah ada pembangunan pada aspek masyarakat dan aspek manusia tersebut adalah adanya peningkatan kapasitas manusia termasuk kapasitas untuk pembangunan manusia itu sendiri (Midgley, 2005).

Istilah pembangunan di Indonesia merupakan terjemahan dari kata-kata: development, growth, change, modernization dan progres, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian pembangunan mencakup banyak aspek dan sudut pandang yang mencakup ekonomi, politik, maupun sosial dan budaya, seperti yang dipelopori oleh Gunar Myrdal dan dikemukakan oleh Dawam Raharjo (Mardikanto, 1993).

Salah satu aspek yang sangat fundamental dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat dapat berperan aktif dalam setiap proses pembangunan. Otonomi dalam arti kata yang sempit dapat diartikan sebagai ‘mandiri’ atau dalam arti kata yang lebih luas dapat diartikan sebagai ‘berdaya’, sehingga otonomi daerah dapat diartikan sebagai kemandirian daerah terutama mengenai pembuatan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan daerahnya sendiri. Jika daerah sudah mampu mencapai kondisi tersebut, maka daerah dapat dikatakan sudah berdaya untuk melakukan apa saja secara mandiri tanpa intervensi dari luar (*external intervention*).

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sedang melakukan pembangunan baik di bidang perekonomian, sosial, budaya, dan

infrastruktur. Tujuan pembangunan di provinsi ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak program yang disusun dan dijalankan yang melibatkan instansi pemerintahan, pihak swasta, dan masyarakat setempat. Salah satu program yang disusun dan dilaksanakan diprovinsi ini adalah program Gerakan Serempak Membangun Kampung (GSMK) yang dilaksanakan di Kabupaten Tulang Bawang.

Kabupaten Tulang Bawang memiliki luas wilayah 3.466,32 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 402.226 jiwa yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan dan 151 kampung. Luas Kabupaten Tulang Bawang menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 . Luas Kabupaten Tulang Bawang menurut kecamatan 2011.

| NO            | Kecamatan        | Luas (km <sup>2</sup> ) | Jumlah penduduk | Jumlah Kampung / Kelurahan |
|---------------|------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1             | Banjar Agung     | 230.88                  | 35.732          | 11                         |
| 2             | Banjar Margo     | 132.95                  | 37.012          | 12                         |
| 3             | Gedung Aji       | 114.47                  | 13.162          | 10                         |
| 4             | Penawar Aji      | 104.45                  | 17.173          | 9                          |
| 5             | Meraksa Aji      | 94.71                   | 13.061          | 8                          |
| 6             | Menggala         | 344.00                  | 41.554          | 9                          |
| 7             | Penawar Tama     | 210.53                  | 26.071          | 14                         |
| 8             | Rawajitu Selatan | 123.94                  | 31.099          | 9                          |
| 9             | Gedung Meneng    | 657.07                  | 37.429          | 11                         |
| 10            | Rawajitu Timur   | 176.65                  | 29.166          | 8                          |
| 11            | Rawa Pitu        | 169.18                  | 16.067          | 9                          |
| 12            | Gedung Aji Baru  | 95.36                   | 20.956          | 9                          |
| 13            | Dente Teladas    | 685.65                  | 59.706          | 12                         |
| 14            | Banjar Baru      | 132.95                  | 12.087          | 10                         |
| 15            | Menggala Baru    | 193.53                  | 11.951          | 10                         |
| <b>Jumlah</b> |                  | <b>3466.32</b>          | <b>402.226</b>  | <b>151</b>                 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011

Tabel 1 menunjukkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang memiliki 15 kecamatan dengan luas area sebesar 3.466,32 km<sup>2</sup>. Kabupaten ini memiliki kampung yang keseluruhan berjumlah 151 kampung yang semuanya merupakan kampung yang diikut sertakan dalam program GSMK.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan otonomi daerah yang mendukung sepenuhnya perkembangan pembangunan di daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang memandang perlu mengembangkan kebijakan program pembangunan oleh, dari dan untuk masyarakat dengan penggunaan pola *bottom-up* melalui pemberdayaan masyarakat. Program pembangunan tersebut diberi nama Program Gerakan Serempak Membangun Kampung (GSMK), yaitu suatu gerakan yang dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat Tulang Bawang untuk berbuat kebaikan secara bersama dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat.

Program GSMK pada awalnya berjalan dari tahun 2013 hingga sampai sekarang ini. Program GSMK adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat Kabupaten Tulang Bawang agar berbuat kebaikan secara bersama dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur kampung atau kelurahan diseluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

Tujuan GSMK di Kabupaten Tulang Bawang yaitu, meningkatkan partisipasi masyarakat kampung atau kelurahan, proses pembelajaran demokrasi, meningkatkan semangat gotong royong dan kebersamaan, meningkatkan swadaya, serta menimbulkan rasa memiliki masyarakat dalam melaksanakan proses

pembangunan, mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di kampung atau kelurahan dengan memberikan bantuan dana langsung sebagai stimulan kepada masyarakat kampung atau kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat untuk masyarakat (Perbub tentang gsmk, 2013).

Program GSMK ini adalah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana kampung yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat, seperti Pembangunan jalan *Onderlagh*, Pembangunan jembatan, Pembangunan saluran Irigasi tersier atau lainnya dengan persetujuan Bupati. Program Gerakan Serentak Membangun Kampung atau Kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang ini pada Fase Pertama direncanakan akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2013-2017) yang dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tahun anggaran kegiatan Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang (Perbub tentang gsmk, 2013).

Program GSMK yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan memiliki Tim Fasilitas Kecamatan (FK) yang dilaksanakan oleh Camat setempat dan dibantu oleh Fasilitator Manajemen dan Asisten Teknis (Astek) yang ditunjuk oleh ketua Tim Fasilitas Kabupaten dengan tugas dan tanggung jawab : (1) Melakukan kordinasi dengan dinas atau instansi terkait, (2) Memfasilitasi perumusan rencana kegiatan, (3) Melaksanakan verifikasi kegiatan yang menjadi sasaran program GSMK, (4) Melakukan *monitoring*, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, (5) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Tim

Fasilitas Kabupaten, (6) membantu kelompok masyarakat (POKMAS) dalam menyusun laporan pelaksanaan program GSMK (Perbub tentang gsmk, 2013).

Kelompok masyarakat sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan pembangunan ditingkat kampung dan diharapkan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada didalam petunjuk pelaksanaan program GSMK demi tercapainya tujuan program.

Kelompok masyarakat di sini merupakan suatu kelompok yang ditunjuk langsung oleh aparat kampung untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang tertulis dalam surat keputusan bupati Tulang Bawang nomor 42 tahun 2013.

Adapun tugas kelompok masyarakat tersebut adalah bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan program GSMK baik secara teknis maupun administratif di kampung masing-masing.

Metode yang digunakan dalam kegiatan GSMK adalah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan pemberian bantuan dana stimulan melalui **Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)** yang dialokasikan kepada Kampung atau Kelurahan sesuai Keputusan Bupati Tulang Bawang berdasarkan usulan kecamatan serta rekomendasi Tim Pembina dan Koordinasi Kabupaten.

Bupati, wakil bupati, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Kampung (BPMPK) merupakan penanggung jawab Program GSMK di tingkat kabupaten sedangkan camat, fasilitator kecamatan, dan astek merupakan

penanggung jawab keberhasilan pelaksanaan program GSMK ditingkat kecamatan.

Pelaksana program GSMK di tingkat kelurahan terdiri dari POKMAS dan kepala kampung. Besaran dana program GSMK untuk setiap kampung dengan jumlah maksimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diberikan berdasarkan indikator jumlah aparatur kampung yang terdiri dari, Kepala Kampung, Juru Tulis, Badan Pemerintahan Kampung (BPK), Kaur, Suku, RT dan RW. Alokasi dana ini meliputi : (1) Pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur dan fasilitas sosial serta umum untuk kegiatan masyarakat dengan alokasi dana sebesar 50%, (2) Perencanaan dan pengawasan teknis sebesar 5%, (3) Penataan administrasi pemerintahan kampung sebesar 10% yang dilaksanakan Tim fasilitas Kabupaten, (4) Pengembangan sentra usaha ekonomi kerakyatan dengan alokasi dana maksimum 20%, (5) Administrasi pengelolaan kegiatan 5%, (6) Pengembangan sumberdaya manusia sebesar 5%, (7) Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi sebesar 5%.

Keberhasilan dari program GSMK diukur dengan berbagai indikator, salah satu indikator tersebut adalah meningkatnya semangat gotong royong dan kebersamaan dalam pelaksanaan proses pembangunan. Gotong royong kebersamaan yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya pada lapisan masyarakat saja tetapi juga pada institusi pelaku pemberdayaan yang memiliki tugas masing-masing sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan dan teknis program GSMK.

Menurut ketentuan petunjuk dan pelaksanaan teknis oleh Bupati Tulang Bawang bahwa tugas POKMAS sebagaimana disebut pada ayat (3) pasal ini memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab secara teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan,
2. Menyusun proposal dan rencana teknis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan fasilitas petugas teknis kecamatan, dan Astek (Konsultan Manajemen Pendamping),
3. Menyiapkan dokumen administrasi sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang diberikan,
4. Menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan,
5. Membuat atau membuka Rekening Pokmas di Bank yang ditunjuk dengan spesimen Ketua pokmas dan Bendahara pokmas (Pencairan dana BLM dari rekening pokmas, bendahara pokmas harus mengajukan usulan untuk penggunaan dana kegiatan ke Camat atau penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) setelah disetujui baru ke bank untuk dicairkan),
6. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang direncanakan bersama masyarakat,
7. Membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan,
8. Melakukan pembukuan penerimaan dana dan penggunaan dana baik untuk upah tenaga kerja, pembelian bahan material, dan lainnya,
9. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Camat secara periodik.



Fasilitator beserta konsultan manajemen berperan dalam suatu kegiatan kecamatan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan. Adanya pelaksanaan peran fasilitator yang baik dalam banyak hal akan berpengaruh terhadap kinerja kelompok masyarakat. Artinya apabila fasilitator melaksanakan perannya dengan baik, maka kinerja kelompok masyarakat (pokmas) juga akan baik, sehingga program GSMK dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian peran fasilitator sangat penting untuk keberlangsungan kegiatan GSMK. Namun, Informasi dan keberadaan program GSMK ini belum diketahui secara menyeluruh oleh masyarakat disebabkan kurangnya pelaksanaan peranan fasilitator kecamatan sehingga kinerja dari kelompok masyarakat belum menunjukkan performa seperti yang diharapkan. Hal inilah yang menyebabkan program ini belum berjalan secara maksimal.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan, penulis tertarik menelaah sampai sejauh mana peranan fasilitator kecamatan serta hubungan kinerja kelompok masyarakat dalam program GSMK di Kabupaten Tulang Bawang.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Sejauh mana peranan fasilitator kecamatan dalam program GSMK di Kabupaten Tulang Bawang ?
2. Sejauh mana kinerja kelompok masyarakat dalam program GSMK di Kabupaten Tulang Bawang ?

3. Apakah ada hubungan antara peranan fasilitator kecamatan dengan kinerja kelompok masyarakat dalam program program GSMK di Kabupaten Tulang Bawang ?

### **B. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Tingkat peranan fasilitator kecamatan dalam program GSMK di Kabupaten Tulang Bawang.
2. Tingkat kinerja kelompok masyarakat dalam program GSMK di Kabupaten Tulang Bawang.
3. Hubungan antara peranan fasilitator kecamatan dengan kinerja kelompok masyarakat dalam program program GSMK di Kabupaten Tulang Bawang.

### **C. Kegunaan penelitian**

Penelitian ini berguna Sebagai :

1. Bahan informasi bagi pemerintah daerah, khususnya bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pertimbangan pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam proses pembangunan.
3. Bahan informasi bagi pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka pelaksanaan program GSMK.
4. Peneliti sejenis sebagai referensi.